

PENGAWAS PEMILIHAN ALAMI KECELAKAAN

Bawaslu Bantul Serahkan Santunan JKK

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada jajaran pengawas pemilihan yang mengalami kecelakaan kerja. Penyerahan dilakukan Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bantul,

Komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bantul, di kediaman korban masing-masing, diantaranya di Bantul, Kasihan dan Banguntapan, Rabu (15/1).

Tercatat ada 4 pengawas yang mendapatkan santunan kecelakaan kerja terdiri dari 1 Panwascam dan 3 orang PTPS. Besaran

klaim santunan kecelakaan kerja yang diterima bervariasi sesuai dengan pembayaran yang ditanggung pada saat pengobatan.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk melindungi keselamatan kerja pengawas pemilihan serentak 2024. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pengawas selama menjalankan tugas pengawasan.

Pada kesempatan yang sama juga diserahkan piagam penghargaan bagi seluruh Panwascam dan jajaran Sekretariat Panwascam atas dedikasinya dalam menjalankan pengawasannya selama tahapan Pilkada Bantul 2024. **(Jdm)-f**



KR-Judiman

Ketua Bawaslu Bantul menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja.

BPBD BANTUL DORONG TINGKATKAN KEWASPADAAN

SPAB, Siapkan Masyarakat Hadapi Bencana

BANTUL (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mendorong masyarakat mewaspadai sejumlah potensi bencana alam dimusim penghujan tahun ini. Di Kabupaten Bantul terdapat 9 risiko bencana dan bisa terjadi sewaktu-waktu.

Komisi A DPRD Kabupaten Bantul tahun 2025 ini terus melanjutkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran guru dan siswa jenjang sekolah dasar.

"Dalam upaya menguatkan mitigasi bencana di Kabupaten Bantul khususnya di sekolah ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tahun 2023 kemarin sedikitnya terdapat 180-an SD di Bantul sudah melaksanakan program tersebut," ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Jumakir, Rabu (15/1).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut mengungkapkan, merujuk data pemerintah Kabupaten Bantul terdapat 9 risiko bencana. Potensi bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu. "Terkait dengan program SPAB tersebut,

sebenarnya yang kita kejar itu kemampuan mitigasi kebencanaan dari guru-guru. Karena Guru itu punya tanggungjawab untuk melindungi anak-anaknya ketika terjadi bencana di sekolah. Jadi bukan murid sarannya. Kalau murid sebatas pengetahuan terkait kebencanaan sampai peralatan," ujarnya.

Jumakir mengatakan, Pemkab Bantul ingin membentuk guru tangguh bencana. "Ketika masyarakat kita mulai dari PNS, guru dan semua sudah siap dengan kesiapsiagaan kebencanaan, maka jika ada bencana apapun semuanya akan aman. Paling tidak lebih siap menghadapi peristiwa alam tersebut," ujarnya.

Selain itu hingga sekarang ini sedikitnya 1.000 guru sudah diikuti Bimtek kebencanaan dan sudah mendapatkan sertipikat. Sementara tahun 2025 ini program SPAB dengan alokasi 30-50 sekolah dasar.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul, Antoni Hutagaol mengatakan, pihaknya mewaspadai semua potensi bencana alam di Bantul. **(Roy)-f**

LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT

Membuat Paspor Bisa di DPMPPTSP Bantul

BANTUL (KR) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Bantul, mulai Selasa (14/1), sudah bisa melayani pembuatan paspor.

Layanan pembuatan paspor di Kompleks Kantor Pemkab Bantul ditandai dengan pemotongan buntal bunga oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta Teddy Riyandi SIP MSI dan Kepala DPMPPTSP Bantul Dra Anniyah MEng.

Bupati mengatakan, layanan paspor ini melengkapi berbagai jenis layanan, baik OPD maupun instansi vertikal yang sudah tersedia sejak diresmikan nya Mall Pelayanan Publik (MPP) pada akhir tahun 2023 lalu dan telah dirasakan banyak manfaatnya.

"Selanjutnya dengan kehadiran layanan paspor ini merupakan wujud nyata dari upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bantul, yang tidak hanya memberikan kemudahan, tapi juga mencerminkan komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan yang prima, cepat dan terintegrasi bagi masyarakat," tutur Bupati.

Lebih lanjut Abdul Halim mengungkapkan, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, pelayanan publik harus terus beradaptasi dan berinovasi. Mall Pelayanan



KR-Judiman

Proses pembuatan paspor di DPMPPTSP Bantul.

Publik tersebut adalah salah satu bentuk jawaban atas tuntutan tersebut. Dengan konsep satu pintu, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan pelayanan publik di satu tempat, termasuk sekarang untuk layanan paspor.

Sementara Teddy Riyandi mengungkapkan maksud dan tujuan Kantor Perwakilan Imigrasi Yogya-

karta di Mall Pelayanan Terpadu DPMPPTSP Bantul ini untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sekarang untuk membuat paspor tidak harus jauh-jauh, cukup di sini saja sudah bisa dilayani dan bukan hanya warga Bantul saja, tapi semua warga Indonesia bisa membuat paspor di pelayanan terpadu Bantul," papar Teddy. **(Jdm)-f**

Revitalisasi Dua Pasar Terancam Tertunda

BANTUL (KR) - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Perindustrian dan Perdagangan (DKUMKPP) Kabupaten Bantul merevitalisasi Pasar Piyungan dan Pasar Mangiran Srandakan belum tentu bisa terealisasi. Program dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 hingga kini belum ada sinyal dari Kementerian Perdagangan terkait pengucuran DAK.

"Hingga kini belum ada informasi pasti dari pusat terkait pengajuan dana dari kami, tapi kelihatannya tidak ada DAK. Informasi terakhir bila DAK untuk revitalisasi pasar pendukung perkembangan kawasan industri," ujar Kabid Sarana dan Prasarana DKUMKPP Bantul, Zona Paramitha, Kamis (16/1).

Dijelaskan, DKUMKPP Bantul telah melakukan perhitungan dan pengajuan anggaran ke Kementerian Perdagangan. Dana dari pusat itu

merevitalisasi Pasar Mangiran dengan anggaran senilai Rp 8 miliar, kemudian Pasar Piyungan sekitar Rp 4 miliar. Tapi setelah mencuat informasi bila DAK revitalisasi pasar untuk pengembangan kawasan industri.

Artinya, pengajuan anggaran untuk revitalisasi dua pasar belum bisa terealisasi. "Bila untuk mendukung perkembangan industri, tentu daerah kawasan industri seperti Tangerang itu masuk. Kami masih menunggu informasi dari pemerintah pusat," ujar Zona.

Hingga kini DKUMKPP Bantul masih menunggu perkembangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kapan diperbolehkannya melakukan lelang proyek untuk revitalisasi pasar tradisional di Bantul. Tanpa ada kejelasan PMK, Pemkab Bantul belum melakukan lelang proyek. Terlebih Surat Edaran Bersama nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE- 1/MK.07/2-

24, tertanggal 11 Desember 2024, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) minta kepada daerah menunda paket pengadaan barang dan jasa serta penandatanganan kontrak pengadaan.

Menurut Zona, tahun 2025 sejumlah pasar tradisional yang direncanakan direvitalisasi relatif kecil, misalnya bagian atap. Setidaknya dua pasar tradisional akan direvitalisasi dengan APBD 2025, yakni Pasar Gumulan dan Pasar Mangiran. "Realisasinya kami masih menunggu, apakah nanti akan dikerjakan PU (DPUPKP Bantul-red) dan juga ketersediaan anggaran," ujarnya Zona.

Sebagaimana diketahui, di Bantul ada 32 pasar rakyat dengan kondisi bangunan berbeda-beda. Sehingga untuk revitalisasi skala besar menggunakan DAK. **(Roy)-f**

HUKUM

DISEBABKAN KORSLETING LISTRIK

Ruko Soto Gobyos Kemuning Ludes Terbakar

KARANGANYAR (KR) - Ruko sekaligus warung Soto Gobyos di Dusun Tanen, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, terbakar pada Selasa (14/1) petang. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting yang mengakibatkan satu ruko ludes dilalap si jago merah.

Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 17.25. Saat itu pemilik warung bernama Sri Wahyuni (58) tengah memasak di dapur. Namun secara tiba-tiba muncul percikan api yang berasal dari jaringan listrik di dapur tersebut.

Dalam sekejap percikan api menyambar benda mudah terbakar yang berada di dekatnya sehingga api semakin membesar. Melihat kejadian tersebut korban panik dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Selanjutnya, warga mendatangi lokasi dan bergotong royong memadamkan dengan peralatan seadanya secara mandiri sambil menunggu bantuan tiba.

Tak berapa lama kemudian pemadam kebakaran dan petugas piket BPBD datang. "Tidak korban dalam kejadian kebakaran ini. Penyebab kebakaran pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara karena korsleting," jelas Hendro.

Hendro mengatakan kebakaran mengakibatkan peralatan atau perabot rumah tangga berikut bahan dagangan ludes terbakar. Terkait besaran nilai kerugian, masih dalam tahap penghitungan. Tim BPBD menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Selain itu memberikan bantuan logistik kepada korban.

Kasi Pemadam Kebakaran Karanganyar, Efan R Pratama, mengatakan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.00. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting. "Pastikan alat kelistrikan nya tidak ada kabel mengelupas. Karena kondisi ini dapat menyebabkan korsleting," jelasnya. Sampai saat ini polisi masih memasang garis pembatas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. **(Lim)-f**

DUGAAN KORUPSI DAN HILANGNYA DOKUMEN PERJANJIAN

2 Pejabat dan 1 Mantan Pejabat Terseret

PURWOKERTO (KR) - Dua pejabat aktif dan satu mantan pejabat Pemkab Banyumas dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah oleh Ananto Widagdo seorang advokat di Purwokerto.

"Laporan ini mencakup dugaan hilangnya arsip negara serta tindak pidana korupsi terkait pengelolaan aset ruko di kawasan Kebondalem Purwokerto," jelas Ananto, Selasa (14/1).

Diungkapkan, laporan ke Direskrim Polda Jawa Tengah menyangkut hilangnya arsip asli perjanjian tertanggal 22 Januari 1980 dan 21 Desember 1982. Perjanjian tersebut melibatkan Pemkab Banyumas dan PB CV Bali terkait pengelolaan tanah dan ruko di kawasan Kebondalem.

"Hilangnya arsip ini melanggar Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 83 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengatur kewajiban menjaga keutuhan dan keamanan arsip negara. Selain itu, hal ini melanggar UU No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi publik," jelasnya.

Menurutnya, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa arsip tersebut tidak pernah diserahkan oleh pencipta arsip, yang dalam hal ini adalah pihak terkait perjanjian. Situasi ini memunculkan dugaan kealasan serius hingga kemungkinan adanya upaya sengaja untuk menyembunyikan dokumen tersebut.

"Berdasarkan temuan awal, kami juga menduga ada unsur *obstruction of justice* yang dilakukan oleh para terlapor. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelidikan," tambah Ananto.

Selain persoalan arsip, laporan yang diajukan Ananto



KR-Driyanto

Kawasan pertokoan Kebondalem Purwokerto yang menjadi sengketa.

juga mencakup dugaan korupsi terkait aset ruko di kompleks Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

Kasus ini bermula dari perjanjian pengelolaan aset antara Pemkab Banyumas dan pihak swasta pada tahun 1980 dan 1982. Dalam perjanjian tersebut, pengelolaan aset seharusnya selesai pada tahun 2012 dan 2014. Setelah masa perjanjian berakhir, aset wajib dikembalikan ke Pemkab Banyumas. Namun, yang terjadi justru

sebaliknya.

"Pada tahun 2017, aset tersebut malah diserahkan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Ini merupakan tindakan yang sangat merugikan negara," jelas Ananto.

Menurutnya, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 165 miliar. Ananto menambahkan bahwa laporan dugaan korupsi ini didasarkan pada temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. **(Dri)-f**

Polisi Tangkap Pengedar Sabu

BANYUMAS (KR) - Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial TYR (24) di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

"Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas tersangka," jelas Kasat Resnarkoba Polresta Banyumas, Kompol Willy Budiyanto, Rabu (15/1).

Kompol Willy, menjelaskan saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, petugas

menemukan alat hisap atau bong dan satu pak plastik klip transparan. Namun, pemeriksaan lebih lanjut pada ponsel TYR mengungkapkan adanya petunjuk berupa foto dan alamat lokasi penyimpanan narkoba.

"Berdasarkan informasi tersebut, polisi membawa tersangka ke lokasi yang dimaksud di pinggir selokan di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran. Di sana, ditemukan satu kantong plastik berwarna merah muda yang berisi 20 paket sabu dengan total berat netto 4,0038 gram," ujar Kompol Willy.

Selain sabu, barang bukti lain

yang disita meliputi 88 plastik klip transparan, satu tutup botol yang dimodifikasi dengan dua sedotan, serta kantong plastik merah muda tempat menyimpan paket sabu.

Saat ini, TYR telah diamankan bersama barang bukti dan dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka terancam hukuman berat atas perbuatannya, minimal lima tahun penjara.

Sementara itu, Polres Tegal juga serius dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya demi menciptakan

lingkungan yang 'bersinar' (bersih narkoba). Hal itu dibuktikan pada Januari ini, sudah ada 3 pelaku penyalahgunaan narkoba salah satunya masih status pelajar diamankan ditahanan sementara Polres setempat.

Terkait hal itu Kasat Narkoba Polres Tegal, Ipda Ahmad Joni SH, mengatakan pihaknya telah berhasil menangkap tiga pelaku pengedar sabu sabu (SS) di tempat berbeda dengan barang bukti berupa SS pada hari Selasa (14/1).

Ipda Ahmad menjelaskan, dalam awal tahun telah dua kali menangkap 2 pelaku. Pertama

pada 3 Januari, di Desa Pesarean Lemahduwur, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Di lokasi itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 paket sabu yang semuanya berjumlah 0,98 gram, rencananya akan edarkan. Selain itu juga ada alat hisap sabu (bong) dari botol kaca yang dilengkapi sedotan dan pipet kaca.

Menurut Ahmad, pelaku MaM yang pertama beralamat di Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi Tegal dan yang kedua Man warga Desa Pesarean, Kecamatan Adiwarna, Tegal. "Keduanya

mengaku sebagai pekerja buruh harian lepas dan mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan itu. barang yang mereka dapatkan di pesan melalui alamat tertentu.

Penindakan kedua dilakukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Tegal. Di lokasi ini, Satnarkoba mengamankan 1 paket ganja kering dengan berat kotor 26,27 gram yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan plastik kresek putih. Satu pelaku berinisial GKM (18), warga Kramat, Tegal, masih berstatus pelajar. **(Dri/Ryd)-f**